



# PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI DI PASAR KOGA BANDAR LAMPUNG

Nabia Dilla Derma Pratiwi<sup>1)</sup>, Desvika Putri Lailani<sup>2)</sup>, Irhas Khasais<sup>3)</sup>, Sujatnico<sup>4)</sup>, Abdul Halim<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [nabiadilla245@gmail.com](mailto:nabiadilla245@gmail.com)

<sup>2)</sup> Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [desvikalailani@gmail.com](mailto:desvikalailani@gmail.com)

<sup>3)</sup> Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [irkhaslampung1234@gmail.com](mailto:irkhaslampung1234@gmail.com)

<sup>4)</sup> Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [sujatnico7@gmail.com](mailto:sujatnico7@gmail.com)

<sup>5)</sup> Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [abdulhalim@fkip.unila.ac.id](mailto:abdulhalim@fkip.unila.ac.id)

## Abstract

This study examines the perceptions and behavior of traders and buyers regarding the policy to reduce single-use plastic bags at Pasar Koga, Bandar Lampung. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews and direct observation. The results indicate that most informants were aware of the policy and generally supported it because of its environmental benefits. However, its implementation remains suboptimal due to consumers' habit of relying on plastic bags, additional costs for traders, and limited government outreach. Therefore, stronger public education, continuous socialization, and regulatory support are needed to enhance the effectiveness of the policy in traditional markets.

**Keywords :** Public policy, single-use plastic bags, traditional market, environment

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi dan perilaku pedagang serta pembeli terhadap kebijakan pengurangan kantong plastik sekali pakai di Pasar Koga, Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengetahui dan mendukung kebijakan tersebut karena dinilai bermanfaat bagi lingkungan. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat kebiasaan konsumen yang masih bergantung pada plastik, adanya pertimbangan biaya bagi pedagang, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, sosialisasi yang berkelanjutan, dan dukungan regulasi agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif di pasar tradisional.

**Kata kunci:** Kebijakan publik, kantong plastik sekali pakai, pasar tradisional, lingkungan.



## PENDAHULUAN

Penggunaan kantong plastik sekali pakai (*single-use plastic bags*) telah menjadi salah satu isu lingkungan yang mendapat perhatian serius di tingkat global. Kantong plastik banyak digunakan karena harganya yang murah, ringan, praktis, dan mudah diperoleh. Namun, di balik kemudahan tersebut, penggunaan kantong plastik menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan dapat mencapai ratusan tahun, sehingga menyebabkan penumpukan sampah yang mencemari tanah, sungai, dan laut. Selain itu, sampah plastik juga berkontribusi terhadap terbentuknya mikroplastik yang dapat membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Proses produksi plastik juga menghasilkan emisi karbon yang turut memperburuk permasalahan perubahan iklim (Tambun & Nastiti, 2025).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi permasalahan sampah plastik yang cukup besar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Setiap tahunnya, jutaan ton sampah plastik dihasilkan, sementara sebagian besar masih belum dikelola secara optimal sehingga berpotensi mencemari lingkungan perairan dan ekosistem laut (Jing & Sutikno, 2020). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dari berbagai pihak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap tingginya penggunaan kantong plastik adalah pasar tradisional. Dalam aktivitas jual beli sehari-hari, pedagang dan pembeli masih sangat bergantung pada kantong plastik sebagai wadah untuk membawa barang belanjaan. Kebiasaan pemberian kantong plastik secara gratis oleh pedagang membuat penggunaan plastik semakin meningkat dan sulit dikendalikan. Akibatnya, pasar tradisional menjadi salah satu sumber utama timbulan sampah plastik di berbagai daerah. Di Kota Bandar Lampung, Pasar Koga sebagai salah satu pasar tradisional yang cukup ramai diduga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap produksi sampah plastik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat, khususnya pedagang dan pembeli sebagai

pengguna utama kantong plastik. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor perilaku konsumen, yang dianalisis melalui pendekatan *Extended Theory of Planned Behavior*, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (Tambun & Nastiti, 2025). Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang diterapkan, tetapi juga oleh persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji persepsi pedagang dan pembeli terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Pasar Koga Bandar Lampung, mengidentifikasi perilaku mereka dalam merespons kebijakan tersebut, serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di lingkungan pasar tradisional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kebijakan lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berhubungan yang diambil oleh aktor atau kelompok aktor politik terkait pemilihan sasaran dan cara pencapaiannya dalam konteks tertentu. Definisi ini menekankan pentingnya proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Permana et al., 2025). Kebijakan publik pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah yang dirancang untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari masalah sosial, kesehatan, infrastruktur, hingga lingkungan hidup.

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dan lingkungan tertentu. Kebijakan publik diarahkan untuk mengamankan dan menjaga kesejahteraan rakyat sehingga dipandang sebagai rencana pemerintah atas program dan kegiatannya (Permana et al., 2025). Winarno (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, mencakup tidak hanya tahap formulasi tetapi juga



implementasi dan evaluasi untuk memastikan dampaknya bagi masyarakat.

Kebijakan publik yang baik harus bersifat sah secara hukum, diterima dan didukung masyarakat, serta dilaksanakan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kompleks yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait (Maharaksa et al., 2025).

### **Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik Sekali Pakai**

Kebijakan pengurangan kantong plastik sekali pakai adalah serangkaian aturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang membatasi, mengurangi, atau melarang penyediaan dan penggunaan kantong plastik yang hanya dipakai satu kali sebelum dibuang, terutama di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar tradisional. Secara hukum, kebijakan ini merupakan bagian dari konsep "pengurangan sampah" yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang membagi pengelolaan sampah menjadi dua pendekatan besar, yaitu pengurangan sampah (pembatasan timbulan, guna ulang, dan daur ulang) serta penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir). (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008), Kantong plastik sekali pakai tergolong produk plastik yang sulit terurai secara alami dan dapat membutuhkan ratusan tahun untuk terdekomposisi, sehingga menjadi salah satu kontributor utama timbunan sampah di TPA maupun pencemaran lingkungan perairan dan laut. Dalam perkembangannya, kebijakan ini juga terkait dengan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR), yaitu skema yang mewajibkan produsen dan pelaku usaha turut bertanggung jawab atas kemasan plastik yang mereka edarkan ke pasar, bukan hanya membebaskan tanggung jawab pengelolaan sampah kepada konsumen dan pemerintah daerah.

Kebijakan ini memiliki beberapa tujuan yang saling berkaitan. Pertama, tujuan lingkungan, yaitu menekan volume timbulan sampah plastik sejak dari sumbernya (hulu) agar beban di tempat pembuangan akhir, seperti TPA Bakung di Bandar Lampung, dapat dikurangi, sekaligus mencegah plastik mencemari tanah, sungai, dan laut. Kedua, tujuan perubahan perilaku, yaitu mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih ke kantong belanja guna ulang berbahan kain atau anyaman, sejalan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008. Ketiga,

tujuan ekonomi dan tata kelola, karena pengurangan sampah plastik terbukti dapat menekan biaya operasional pengelolaan sampah daerah; sebagai gambaran, penerapan larangan kantong plastik di Kota Banjarmasin sejak 2016 berhasil mengurangi sampah plastik hingga 55 persen serta menghemat anggaran produksi kantong plastik sekitar Rp563 juta. Keempat, tujuan tanggung jawab produsen, yaitu mendorong dunia usaha menyusun peta jalan pengurangan sampah kemasan sesuai target nasional sebesar 30 persen pada tahun 2029, sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.75 Tahun 2019. (Nugroho & Romadhon, 2022).

Pada level nasional, kerangka kebijakan ini berpijak pada UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta diperkuat melalui Peraturan Menteri LHK No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang mewajibkan pelaku usaha di sektor manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel (termasuk pusat perbelanjaan dan pasar rakyat) menyusun dan melaksanakan rencana pengurangan sampah kemasan, dengan target pengurangan 30 persen dari baseline timbulan sampah pada tahun 2029. Pada level daerah, sejak publikasi penelitian Jambeck dkk. (2015) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia, berbagai pemerintah daerah mulai menerbitkan aturan turunan, antara lain Provinsi Bali melalui Pergub No. 97 Tahun 2018, Kota Banjarmasin melalui Perwali No. 18 Tahun 2016, Kota Balikpapan melalui Perwali No. 8 Tahun 2018, Kota Bogor melalui Perwali No. 61 Tahun 2018, serta Provinsi DKI Jakarta melalui Pergub No. 142 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Hingga saat ini tercatat puluhan kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia telah memiliki regulasi sejenis. (Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, 2019).

Di Bandar Lampung, kebijakan ini diperkuat melalui Perda Kota Bandar Lampung No. 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur secara komprehensif aspek sumber, jenis, hingga fasilitas pengelolaan sampah di kota tersebut, dan kini sedang diselaraskan dengan rancangan Peraturan Gubernur Lampung mengenai pembatasan kantong plastik di area perbelanjaan. Meski demikian, implementasi di lapangan, khususnya di pasar tradisional, masih menghadapi tantangan berupa kebiasaan pedagang yang sudah mengakar dalam menggunakan plastik sekali pakai, kekhawatiran soal biaya penggantian kemasan, serta belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan teknis pelaksana Perda



tersebut.(Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah, 2023).

### **Persepsi Masyarakat**

Persepsi masyarakat dalam konteks kebijakan publik dapat dipahami sebagai cara masyarakat menilai, memahami, dan merespons kebijakan yang dibuat pemerintah. Persepsi ini tidak hanya berkaitan dengan apakah masyarakat mengetahui isi kebijakan, tetapi juga menyangkut apakah kebijakan tersebut dianggap sah, bermanfaat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Dalam kebijakan publik, masyarakat bukan sekadar objek penerima kebijakan, melainkan bagian dari ruang publik yang berinteraksi dengan negara dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan (Suryono, 2014).

Pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Kebijakan yang dipahami dengan baik cenderung lebih mudah diterima dan dijalankan, sedangkan kebijakan yang dianggap tidak jelas, tidak adil, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial akan lebih mudah menimbulkan penolakan. Dengan demikian, persepsi masyarakat dapat diposisikan sebagai bentuk penilaian sosial atas arah, tujuan, dan dampak kebijakan publik terhadap kehidupan bersama (Dewi, 2022).

Selain itu, persepsi masyarakat juga berkaitan dengan hubungan antara kebijakan publik dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk menjawab kebutuhan publik, mengatasi masalah sosial, dan menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik. Karena itu, masyarakat akan membentuk persepsi positif apabila kebijakan dirasakan memberi manfaat nyata, menjawab persoalan yang dihadapi, dan membuka kesempatan yang lebih adil bagi semua warga (Suryono, 2014)

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, komunikasi kebijakan. Kebijakan yang disampaikan secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami akan membantu masyarakat memahami tujuan serta manfaat kebijakan. Sebaliknya, komunikasi yang lemah dapat menimbulkan salah tafsir, ketidakpastian, bahkan penolakan dari kelompok sasaran (Dewi, 2022)

Kedua, kesesuaian kebijakan dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat cenderung menerima kebijakan apabila isi kebijakan dianggap relevan dengan kebutuhan mereka, tidak bertentangan dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat, dan mampu menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan. Jika kebijakan dinilai jauh dari kondisi nyata masyarakat, maka persepsi yang muncul dapat bersifat negatif.

Ketiga, legitimasi dan dasar hukum kebijakan. Masyarakat lebih mudah menerima kebijakan yang dibentuk secara sah, konstitusional, dan melalui lembaga yang berwenang. Kejelasan aturan memberi rasa kepastian, sedangkan aturan yang ambigu atau saling bertentangan dapat menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut

Keempat, kondisi sosial dan struktur masyarakat. Persepsi masyarakat tidak terbentuk dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat kebijakan dilaksanakan. Masyarakat yang majemuk, baik dari sisi suku, agama, budaya, maupun lapisan sosial-ekonomi, dapat memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu kebijakan yang sama. Perbedaan kepentingan antara kelompok elit dan masyarakat akar rumput juga dapat memengaruhi cara kebijakan dipahami dan diterima.

Kelima, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi masalah, dan terlibat dalam pengambilan keputusan, maka rasa memiliki terhadap kebijakan akan meningkat. Partisipasi semacam ini dapat membentuk persepsi yang lebih positif karena masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, bukan sekadar menjadi sasaran kebijakan.

Keenam, manfaat dan rasionalitas kebijakan. Masyarakat akan lebih menerima kebijakan apabila kebijakan tersebut dipandang logis, masuk akal, dan memberikan keuntungan sosial yang nyata. Dengan kata lain, persepsi positif tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan tidak hanya normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan dan membawa dampak yang jelas bagi kehidupan mereka.

### **Dampak Penggunaan Kantong Plastik**

#### **Dampak Lingkungan**

Penggunaan kantong plastik secara masif menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius dan meluas. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan permasalahan krusial terkait polusi sampah plastik. Sepanjang tahun-tahun terakhir, Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah plastik setiap tahunnya, dan diperkirakan aliran sampah plastik ke lautan tetap signifikan (Irtanti & Rukisna, 2026). Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan penyumbatan sistem drainase yang berujung pada banjir, pencemaran tanah dan air, serta munculnya mikroplastik yang menimbulkan risiko kesehatan manusia. Selain itu, pembakaran sampah plastik menambah emisi gas rumah kaca di atmosfer sehingga memperburuk perubahan iklim (Irtanti & Rukisna, 2026).



Kemasan plastik juga berkontribusi terhadap pencemaran tanah, air, dan laut, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat melalui akumulasi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya nyata dalam mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik, termasuk melalui alternatif kemasan berbasis bahan alami yang ramah lingkungan dan ekonomis.

### **Dampak Sosial dan Ekonomi**

Dari dimensi sosial, penggunaan kantong plastik yang berlebihan berkorelasi dengan perilaku konsumtif masyarakat yang cenderung mengabaikan dampak lingkungan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik masih relatif rendah, khususnya di kalangan pedagang dan konsumen di pasar tradisional (Anggia & Marniati, 2024). Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yang diterapkan di berbagai daerah secara bertahap mulai mengubah perilaku konsumen, di mana lebih banyak masyarakat yang bersedia membawa kantong belanja sendiri setelah kebijakan diterapkan.

Beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan pemakaian plastik sekali pakai, yaitu mindset atau pola pikir merupakan dasar seseorang sebelum berpikir. Dalam hal ini sering dijumpai pada *low middle society* karena ekonomi tetap menjadi prioritas menjadikan masyarakat tetap memilih harga murah yaitu dibandingkan barang ramah lingkungan yang lebih mahal namun berdampak lebih baik. Di sisi lain, kebijakan pengurangan plastik juga berdampak pada industri produsen plastik yang harus beradaptasi dengan beralih ke produk-produk ramah lingkungan, yang pada jangka panjang justru dapat membuka peluang pasar baru dan mendorong inovasi industri berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena secara mendalam sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan kebiasaan pedagang dan pembeli di Pasar Koga dalam penggunaan plastik sekali pakai serta berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi limbah plastik. Data yang dikumpulkan tidak berupa angka, melainkan berbentuk hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi langsung di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif

deskriptif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perilaku masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi masih tingginya penggunaan plastik di lingkungan Pasar Koga.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Koga, Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki tingkat penggunaan plastik cukup tinggi, terutama pada pedagang sayur, ikan, dan kebutuhan rumah tangga.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Karena kondisi lapangan pada saat penelitian dilakukan pada siang hari dan aktivitas pasar sudah relatif sepi, maka teknik pengumpulan data yang digunakan difokuskan pada wawancara mendalam (*in-depth interview*). Peneliti hanya berhasil mewawancarai 1 pedagang dan 1 pembeli sebagai informan utama. Selain itu, data juga diperkuat dengan observasi langsung terhadap kondisi pasar saat penelitian berlangsung.

### **Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. 1 pedagang di Pasar Koga
2. 1 Pembeli/konsumen di Pasar Koga

Pemilihan informan ini tentunya dilakukan secara insidental, yaitu berdasarkan siapa saja yang ditemui dan bersedia diwawancarai pada saat penelitian berlangsung.

### **Teknik Analisis Data**

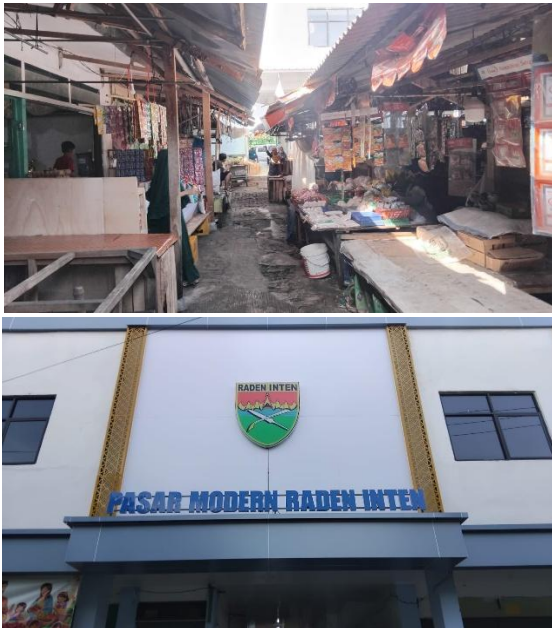
Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yaitu :

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pasar Koga merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Bandar Lampung. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sayur-mayur, buah-buahan, ikan, daging, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Aktivitas jual beli di Pasar Koga umumnya berlangsung pada pagi hingga siang hari, dengan tingkat keramaian yang cukup tinggi pada jam-jam tertentu.



**Gambar 1.** Kondisi Pasar Koga

Sebagai pasar tradisional, Pasar Koga masih menggunakan sistem transaksi langsung antara pedagang dan pembeli tanpa sistem modern seperti di pasar swalayan. Kondisi ini menyebabkan penggunaan kantong plastik masih sangat umum, terutama dalam proses pengemasan barang dagangan. Hal tersebut menjadikan Pasar Koga relevan sebagai lokasi penelitian terkait pengurangan limbah plastik. Selain itu, Pasar Koga memiliki beberapa los dan kios pedagang yang tertata dalam area pasar, meskipun pada beberapa bagian masih terlihat sederhana. Kebersihan pasar menjadi salah satu perhatian, terutama dalam pengelolaan sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitas jual beli sehari-hari.

Dengan karakteristik tersebut, Pasar Koga menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik sekali pakai serta upaya pengurangan limbah plastik di lingkungan pasar tradisional.

### Hasil Wawancara

#### Hasil Wawancara Narasumber Pedagang

Ibu Arini, selaku pedagang di pasar tradisional, mengaku telah mengetahui adanya kebijakan pemerintah terkait pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, meskipun ia merasa sosialisasi mengenai kebijakan tersebut belum dilakukan secara optimal. Informasi tentang kebijakan ini ia peroleh hanya dari kabar yang beredar di lingkungan sekitarnya. Menurut Ibu Arini, tujuan dari kebijakan pengurangan kantong plastik adalah untuk menekan jumlah

sampah plastik, dan ia menilai kebijakan tersebut sudah sangat baik sebagai bentuk upaya nyata dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Ibu Arini menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Namun, ia mengemukakan bahwa kebijakan tersebut memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah berkurangnya volume sampah plastik, sedangkan sisi negatifnya berkaitan dengan kenaikan harga kantong plastik yang turut membebani pedagang. Ia juga menilai bahwa penggunaan kantong plastik saat ini sudah sangat berlebihan, terbukti dari banyaknya sampah plastik yang dihasilkan setiap harinya. Terkait penggunaan alternatif, Ibu Arini menyatakan bersedia beralih ke tas belanja yang dapat digunakan kembali, bahkan ia sendiri sudah terbiasa menggunakan tas belanja pribadi. Harga plastik yang semakin mahal pun mendorongnya untuk mulai membatasi penggunaan kantong plastik dalam kegiatan berdagangnya.



**Gambar 2.** Kegiatan wawancara dengan pedagang (Ibu Arini) di Pasar Koga

Dalam hal dampak kebijakan terhadap aktivitas berdagang, Ibu Arini mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik membuatnya lebih berhati-hati dan hemat dalam menggunakannya. Adapun kendala yang dihadapi meliputi harga kantong plastik yang mahal serta kebiasaan pembeli



yang tidak membawa tas belanja sendiri. Menurut Ibu Arini, masyarakat masih banyak menggunakan kantong plastik karena sebagian belum mengetahui adanya kebijakan pengurangan plastik, dan sebagian lainnya sering lupa atau tidak sempat membawa tas belanja dari rumah. Sebagai saran, ia berharap pemerintah dapat lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini agar masyarakat semakin sadar dan berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

### Hasil Wawancara Narasumber Pembeli

Kak Arlin, selaku pembeli di pasar tradisional, menyatakan bahwa ia telah mengetahui kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai melalui pemberitaan di media. Ia memahami bahwa tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan. Kak Arlin menilai kebijakan ini sangat baik dan menyatakan dukungan penuh karena menurutnya kebijakan ini merupakan salah satu langkah konkret yang dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan sampah. Ia juga berpendapat bahwa kebijakan ini sangat bermanfaat, baik bagi kelestarian lingkungan maupun bagi masyarakat secara luas.



**Gambar 3.** Kegiatan wawancara dengan pembeli (Kak Arlin) di Pasar Koga

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Koga merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Bandar Lampung. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sayur-mayur, buah-buahan, ikan, daging, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Aktivitas jual beli di Pasar Koga umumnya

berlangsung pada pagi hingga siang hari, dengan tingkat keramaian yang cukup tinggi pada jam-jam tertentu.

Menurut Kak Arlin, penggunaan kantong plastik saat ini sudah tergolong berlebihan. Ia menyatakan kesediaannya untuk beralih menggunakan tas belanja ramah lingkungan, meskipun mengakui bahwa pada hari wawancara ia tidak membawa tas belanja sendiri sehingga terpaksa menggunakan kantong plastik dari pedagang. Kebijakan pengurangan plastik dirasakan cukup berpengaruh terhadap aktivitas belanjanya sehari-hari, terutama saat berbelanja di toko-toko yang sudah tidak menyediakan kantong plastik, sehingga ketika lupa membawa tas belanja sendiri, ia merasa kesulitan dalam membawa barang belanjanya.

Kendala utama yang dihadapi Kak Arlin adalah rasa kebingungan ketika lupa membawa tas belanja, sementara harga kantong plastik yang tersedia pun terbilang mahal. Ia berpendapat bahwa masyarakat masih banyak menggunakan kantong plastik karena minimnya sosialisasi serta kebiasaan lupa membawa tas belanja. Sejalan dengan pandangan narasumber dari kelompok pedagang, Kak Arlin memberikan saran serupa, yakni perlunya peningkatan sosialisasi dari pihak pemerintah agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dapat terus meningkat.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di pasar tradisional, ditemukan bahwa kedua narasumber, baik dari kelompok pedagang maupun pembeli, telah mengetahui adanya kebijakan pemerintah terkait pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Ibu Arini selaku pedagang mengaku mengetahui kebijakan tersebut meskipun hanya dari kabar yang beredar di lingkungan sekitarnya, sementara Kak Arlin selaku pembeli memperoleh informasi melalui media berita. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah sampai ke telinga masyarakat, saluran informasi yang digunakan masih bersifat tidak langsung dan belum terstruktur secara resmi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Dewi, 2022) yang menyatakan bahwa komunikasi kebijakan yang lemah dapat menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Ibu Arini sendiri secara tegas menyebutkan bahwa sosialisasi resmi mengenai kebijakan ini belum dilakukan secara optimal di lingkungan pasar, sehingga meskipun kesadaran awal sudah terbentuk, pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap isi serta tujuan kebijakan masih belum merata di kalangan pelaku pasar tradisional.

Secara umum, kedua narasumber memberikan persepsi yang positif terhadap kebijakan pengurangan kantong plastik



sekali pakai. Ibu Arini menilai kebijakan ini sudah sangat baik sebagai upaya nyata dalam mengurangi sampah, sementara Kak Arlin menyatakan bahwa kebijakan ini sangat bermanfaat bagi lingkungan maupun masyarakat luas. Persepsi positif ini terbentuk karena keduanya memandang kebijakan tersebut relevan dengan persoalan lingkungan yang nyata mereka rasakan, yakni semakin banyaknya sampah plastik di sekitar mereka. Hal ini selaras dengan pendapat (Dewi, 2022) bahwa masyarakat cenderung membentuk persepsi positif apabila kebijakan dinilai relevan dengan kebutuhan dan persoalan yang benar-benar dihadapi. Kedua narasumber pun sepakat bahwa penggunaan kantong plastik saat ini sudah sangat berlebihan, yang memperkuat keyakinan mereka bahwa kebijakan pengurangan plastik memang diperlukan, sejalan dengan prinsip yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengurangan sampah dari sumbernya merupakan langkah utama dalam menekan volume timbulan sampah plastik. Meski demikian, Ibu Arini turut mengungkapkan sisi negatif dari kebijakan ini, khususnya dampak ekonomi yang dirasakan secara langsung sebagai pedagang, di mana kenaikan harga kantong plastik akibat kebijakan pembatasan menjadi beban tambahan dalam kegiatan berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik tidak selalu sepenuhnya positif atau negatif, melainkan bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh posisi serta kepentingan masing-masing kelompok, sebagaimana dijelaskan (Suryono, 2014) bahwa perbedaan kepentingan antara berbagai lapisan masyarakat dapat memengaruhi cara kebijakan dipahami dan diterima.

Kedua narasumber menyatakan kesiapan untuk beralih menggunakan alternatif pengganti kantong plastik, seperti tas belanja kain yang dapat digunakan kembali. Ibu Arini bahkan telah mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, terdorong oleh mahalnya harga kantong plastik, sementara Kak Arlin menyatakan kesediaannya meskipun mengakui bahwa kebiasaan lupa membawa tas belanja masih menjadi tantangan tersendiri. Kesiapan ini mencerminkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip *reuse* sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2008. Namun demikian, perubahan perilaku ini belum sepenuhnya konsisten, selaras dengan temuan (Husain & Hertati, 2023) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik masih relatif rendah, khususnya dalam hal penerapan kebiasaan baru yang berkelanjutan di pasar tradisional.

Meskipun persepsi yang ditunjukkan kedua narasumber cenderung positif, keduanya mengidentifikasi sejumlah kendala nyata dalam pelaksanaan kebijakan di pasar

tradisional. Dari sisi pedagang, kendala utama yang dihadapi Ibu Arini adalah harga kantong plastik yang semakin mahal serta kebiasaan pembeli yang tidak membawa tas belanja sendiri, sehingga pedagang tetap merasa harus menyediakan kantong plastik demi kepraktisan transaksi. Dari sisi pembeli, Kak Arlin mengungkapkan bahwa kendala terbesar adalah kebiasaan lupa membawa tas belanja dari rumah, yang menyebabkan ketergantungan pada kantong plastik yang disediakan pedagang masih sulit dihindari. Kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan perilaku di tingkat masyarakat tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kesadaran individual semata, sebab sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat adalah pola pikir yang menempatkan aspek ekonomi dan kepraktisan sebagai prioritas utama dibandingkan pertimbangan lingkungan. Tantangan implementasi di pasar tradisional juga diperparah oleh belum adanya aturan teknis yang bersifat mengikat, mengingat hingga saat ini Kota Bandar Lampung belum memiliki Peraturan Wali Kota sebagai aturan pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Baik Ibu Arini maupun Kak Arlin memberikan saran yang senada, yakni perlunya peningkatan sosialisasi dari pemerintah agar masyarakat lebih memahami tujuan dan urgensi kebijakan pengurangan kantong plastik. Harapan ini menegaskan bahwa masyarakat sebenarnya terbuka dan mendukung kebijakan tersebut, namun membutuhkan pendampingan serta komunikasi yang lebih aktif agar perubahan perilaku dapat terjadi secara nyata dan berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argumen (Dewi, 2022) bahwa kebijakan yang disampaikan secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami akan membantu masyarakat menginternalisasi tujuan serta manfaatnya, sementara partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan berperan penting dalam membentuk rasa memiliki sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif. Keberhasilan kebijakan serupa di Kota Banjarmasin yang berhasil mengurangi sampah plastik hingga 55 persen setelah penerapan larangan kantong plastik sejak 2016 dapat menjadi rujukan bahwa kebijakan yang disertai sosialisasi masif dan penegakan aturan yang konsisten mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat (Nugroho & Romadhon, 2022).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali



pakai di Pasar Koga, Bandar Lampung, pada dasarnya telah dikenal oleh pedagang dan pembeli. Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa isu pengurangan sampah plastik telah mulai dipahami oleh masyarakat pasar sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, sebagian besar informan juga menunjukkan sikap yang cenderung positif terhadap kebijakan tersebut karena dipandang memiliki manfaat dalam mengurangi pencemaran dan menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi implementasinya, di antaranya kebiasaan konsumen yang belum terbiasa membawa tas belanja sendiri, adanya pertimbangan ekonomi dari sisi pedagang terkait biaya penyediaan kantong, serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan kesadaran masyarakat, konsistensi pelaksanaan, dan penguatan langkah-langkah edukatif di lapangan.

Dengan demikian, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar tradisional memerlukan sinergi antara pemerintah, pedagang, dan pembeli agar tujuan pengurangan sampah plastik dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

#### Saran

1. Bagi pemerintah daerah, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, merata, dan berkelanjutan kepada pedagang maupun pembeli mengenai tujuan, manfaat, dan urgensi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.
2. Bagi pengelola pasar, perlu adanya dukungan nyata terhadap pelaksanaan kebijakan, misalnya melalui pemasangan media informasi, imbauan, dan penguatan budaya pasar yang lebih ramah lingkungan.
3. Bagi pedagang, diharapkan mulai mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik sekali pakai serta mendorong pembeli untuk menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang.
4. Bagi pembeli, perlu ditumbuhkan kebiasaan membawa tas belanja sendiri sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pengurangan sampah plastik.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan

informan yang lebih luas atau dengan pendekatan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut.

#### REFERENSI

- Anggia, D., & Marniati, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Pengurangan Limbah Plastik Di Sektor Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tujuh Belas (Jurkes TB)*, 6(1), 343–367.
- Dewi, D. S. K. (2022). *B u k u. https://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf*
- Husain, I. A., & Hertati, D. (2023). Policy Implementation for Reducing the Use of Plastic Bags. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 233–241. <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Irtanti, M. D., & Rukisna, L. (2026). Kebijakan pengelolaan sampah plastik sebagai solusi pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 493–497.
- Jing, Z., & Sutikno. (2020). Legal Issues on Indonesian Marine Plastic Debris Pollution. *Indonesia Law Review*, 10(1), 87–110. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.592>
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/download/320/317>
- Nugroho, F. H., & Romadhon, S. (2022). *Minat peserta didik mtsn 3 banyuwangi dalam gim blooket pada pembelajaran bahasa indonesia*. 10(2).
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah (2023).
- Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (2019).
- Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., A, H. M., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Definisi Kebijakan Publik : Pengertian , Unsur-Unsur Dan Perkembangan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara Unsur yang Membentuk Definisi Kebijakan Publik*. 1, 453–457.



- Suryono, A. (2014). TRANSPARANSI Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ISSN 2085-1162 Volume VI, Nomor 02, September 2014. *Ilmiah Ilmu Administrasi*, VI(September), 98–102.
- Tambun, E. T. N., & Nastiti, A. (2025). Reducing Single-Use Plastic in Indonesian Traditional Markets: An Application of the Extended Theory of Planned Behavior. *Jurnal Sositologi*, 24(3), 374–384. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2025.24.3.7>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (2008).